



BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

MITIGASI RISIKO PENGADAAN CPNS TAHUN 2018

Oleh:
Deputi Kepala BPKP Bidang PIP Bidang Polhukam PMK

MATERI

- 1. TUGAS BPKP DI PANSELNAS**
- 2. TUJUAN PENGADAAN PNS**
- 3. RISIKO PENGADAAN PNS**

Tugas Tim Pengarah

(SK Menteri PANRB Nomor 16 Tahun 2018 tentang Panitia Seleksi Nasional Pengadaan PNS Tahun 2018)

1. Memberikan arahan terkait kebijakan pengadaan PNS Tahun 2018;
2. Memberikan arahan kepada Tim Pelaksana, Tim Pengawas, Tim Audit Teknologi, Tim Pengamanan Teknologi, Tim *Quality Assurance*, dan Sekretariat Tim Pengarah agar pelaksanaan pengadaan PNS berlangsung secara objektif, transparan, akuntabel, dan bebas dari KKN serta tidak dipungut biaya;
3. Menerima rekomendasi dari Ketua Tim Pelaksana tentang nilai ambang batas kelulusan SKD;
4. Menerima hasil integrasi SKD dan SKB dari Ketua Tim Pelaksana;
5. Menerima laporan hasil pelaksanaan pengadaan PNS Tahun 2018 dari Ketua Tim Pelaksana.

Tugas Tim Pengawas

(SK Menteri PANRB Nomor 16 Tahun 2018 tentang Panitia Seleksi Nasional Pengadaan PNS Tahun 2018, Diktum Kesebelas)

1. Menyusun Desain Pengawasan Pengadaan PNS tahun 2018
2. Melakukan Pengawasan terhadap semua Tahapan Pengadaan PNS berkoordinasi dengan Tim Audit Teknologi, Tim QA serta jika diperlukan dengan APIP KL dan Pemda
3. Melaporkan hasil pengawasan ke Tim Pengarah

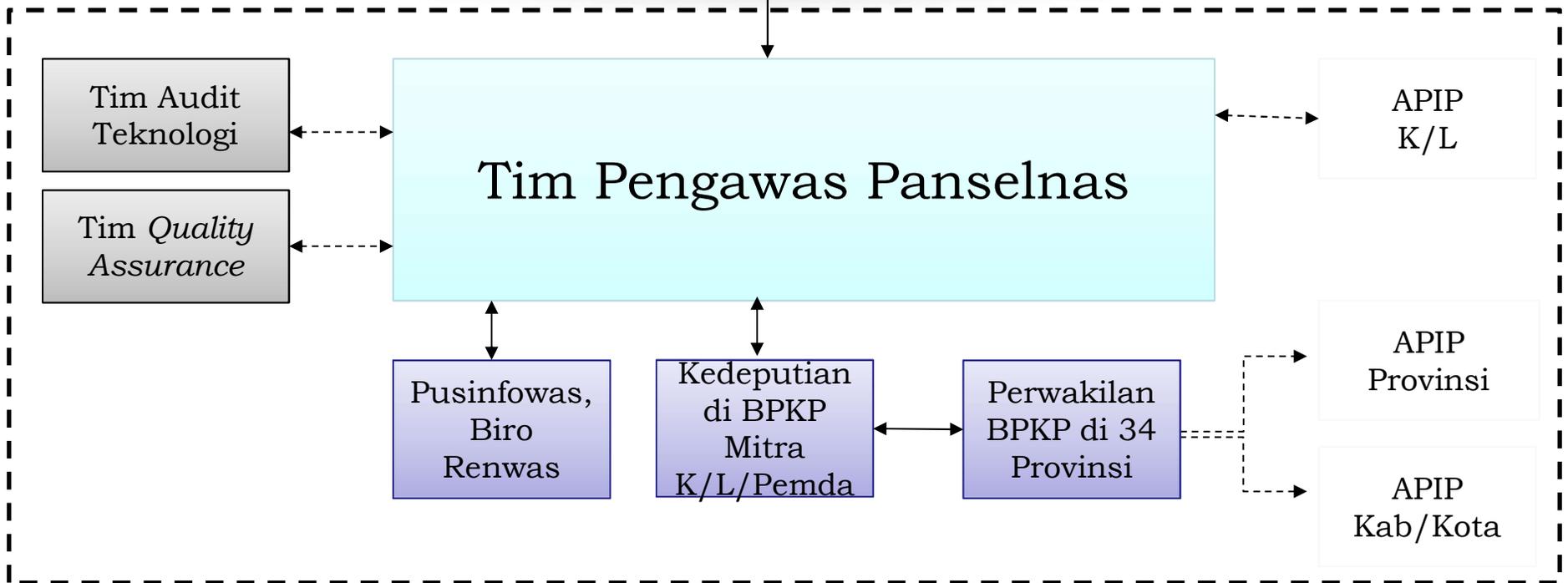
Tugas Tim Audit Teknologi

(SK Menteri PANRB Nomor 16 Tahun 2018 tentang Panitia Seleksi Nasional Pengadaan PNS Tahun 2018)

1. Melakukan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dalam rangka audit teknologi pengadaan CPNS tahun 2018;
2. Merumuskan dan menyusun petunjuk teknis pelaksanaan audit teknologi pengadaan CPNS tahun 2018;
3. Memastikan sistem teknologi yang digunakan berfungsi sebagaimana yang direncanakan;
4. Melakukan audit terhadap sistem teknologi sebelum digunakan untuk seleksi CPNS;
5. Melakukan audit terhadap sistem teknologi selama pelaksanaan;
6. Melakukan audit terhadap sistem teknologi setelah digunakan;
7. Melaporkan hasil pelaksanaan audit teknologi kepada Ketua Tim Pengarah.

3. Organisasi Pengawasan

Tim Pengarah Panselnas



Tim Pengawas Berdasarkan SK Panselnas terdiri dari

1. BPKP
2. KemenpanRB
3. Ombudsman
4. Inspektorat BKN
5. Itjen Kemdagri

PERAN PENGAWASAN INTERN

(Pasal 11 PP 60/2008)

Perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah dengan **memberikan peringatan dini** dan **meningkatkan efektivitas manajemen risiko** dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah

PP 60/2008

PASAL 13

1. Pimpinan Instansi Pemerintah **wajib melakukan penilaian risiko**
2. Penilaian risiko terdiri atas identifikasi risiko dan analisis risiko

PENILAIAN RISIKO

1. Kegiatan penilaian atas kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran Instansi Pemerintah. (Penjelasan pasal 3)
2. Dalam rangka penilaian risiko pimpinan Instansi Pemerintah menetapkan:
 - ✓ Tujuan **Instansi Pemerintah**; dan
 - ✓ Tujuan pada tingkatan **kegiatan**

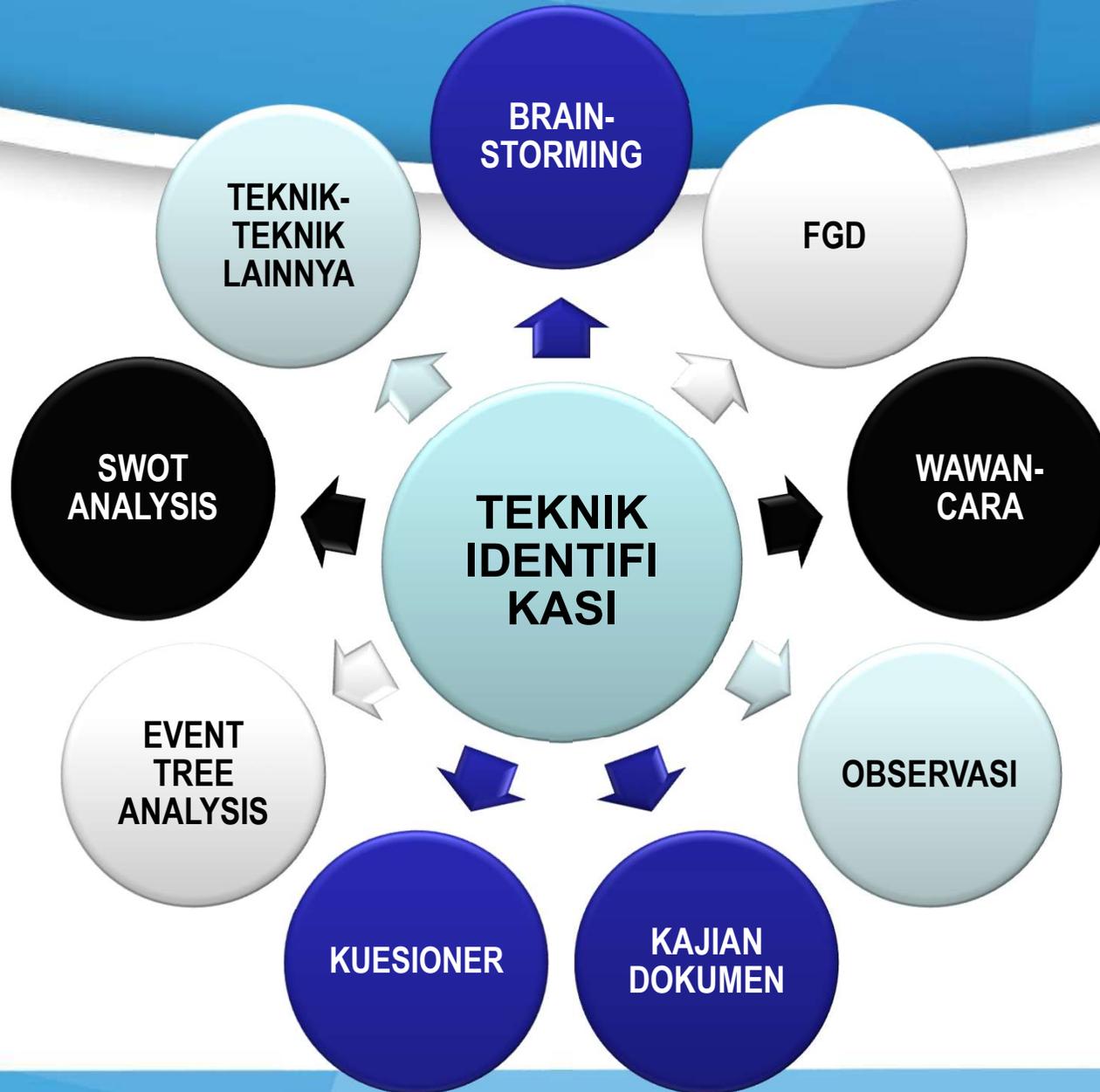
Tujuan Pelaksanaan Seleksi CPNS (Permen PANRB Nomor 20 Tahun 2017)

- A. Memperoleh Calon Pegawai Negeri Sipil yang profesional, jujur, bertanggung jawab, netral, yakni Calon Pegawai Negeri Sipil yang:
1. memiliki karakteristik pribadi selaku penyelenggara pelayanan publik;
 2. mampu berperan sebagai perekat NKRI;
 3. memiliki intelegensia yang tinggi untuk pengembangan kapasitas dan kinerja organisasi; dan
 4. memiliki keterampilan, keahlian dan perilaku sesuai dengan tuntutan jabatan.
- B. Mewujudkan sistem seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil yang kompetitif, adil, objektif, transparan, tidak dipungut biaya, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme serta bebas dari intervensi politik; dan
- C. Memperoleh Putra/Putri terbaik bangsa sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil.

IDENTIFIKASI RISIKO

Proses menetapkan **apa, dimana, kapan, mengapa**, dan **bagaimana** sesuatu dapat terjadi, sehingga dapat berdampak negatif terhadap pencapaian tujuan

TEKNIK-TEKNIK IDENTIFIKASI RISIKO



RESPON TERHADAP RISIKO



TAHAPAN PENILAIAN RISIKO

(PP 60/2008)



PENGADAAN PNS ?

TUJUAN PENGADAAN PNS

- Untuk **menjamin kualitas PNS** pengadaan PNS dilakukan secara nasional. (Psl 16 PP 11/2017)
- Dalam rangka **menjamin obyektifitas** pengadaan PNS secara nasional, Menteri membentuk panitia seleksi nasional pengadaan PNS (Psl 17)

TAHAPAN PENGADAAN PNS

No	Tahapan
A	PERENCANAAN
B	PENGUMUMAN LOWONGAN
C	PELAMARAN
D	SELEKSI
	1. Seleksi Kompetensi Dasar (SKD)
	2. Seleksi Kompetensi Bidang (SKB)
	3. Integrasi Nilai SKD dan SKB
E	PENGUMUMAN HASIL SELEKSI
F	PENGANGKATAN CPNS DAN MASA PERCOBAAN
G	PENGANGKATAN PNS

PENILAIAN RISIKO

1. Tetapkan tujuan per tahapan dengan mengacu pada tujuan strategis pengadaan PNS (PP 11/2017)
2. Identifikasi Risiko setiap tahapan
3. Tetapkan Aktivitas Pengendalian (mitigasi risiko)

DAFTAR RISIKO DALAM PENGADAAN PNS TAHUN 2018



BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

Nomor : S.⁸⁷⁴/K/D2/2018 20 Juli 2018
Lampiran : Satu berkas
Hal : Daftar Risiko dalam Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Tahun 2018

Yth.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
di Jakarta

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2014 tentang Manajemen ASN dan Surat Keputusan Menteri PAN dan RB Nomor 16 tahun 2018 Tentang Panitia Seleksi Nasional (Panselnas) Pengadaan PNS tahun 2018, bersama ini terlampir kami sampaikan daftar risiko, kemungkinan permasalahan yang dapat terjadi, pada setiap tahapan kegiatan pelaksanaan Pengadaan PNS tahun 2018.

Agar proses pelaksanaan pengadaan PNS akuntabel dan dapat mendukung tercapainya tujuan yang telah ditetapkan, mohon kiranya Bapak Menteri berkenan untuk:

1. Meminta perhatian kepada Pembina Kepegawaian dan Penanggung Jawab Pengadaan PNS Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang akan mendapat formasi tahun 2018 atas risiko-risiko dimaksud.
2. Meminta pejabat Kementerian/Lembaga/Pemerintah tersebut menyusun langkah-langkah rencana tindak pengendalian dan mitigasi risiko.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Bapak Menteri, kami sampaikan terima kasih.

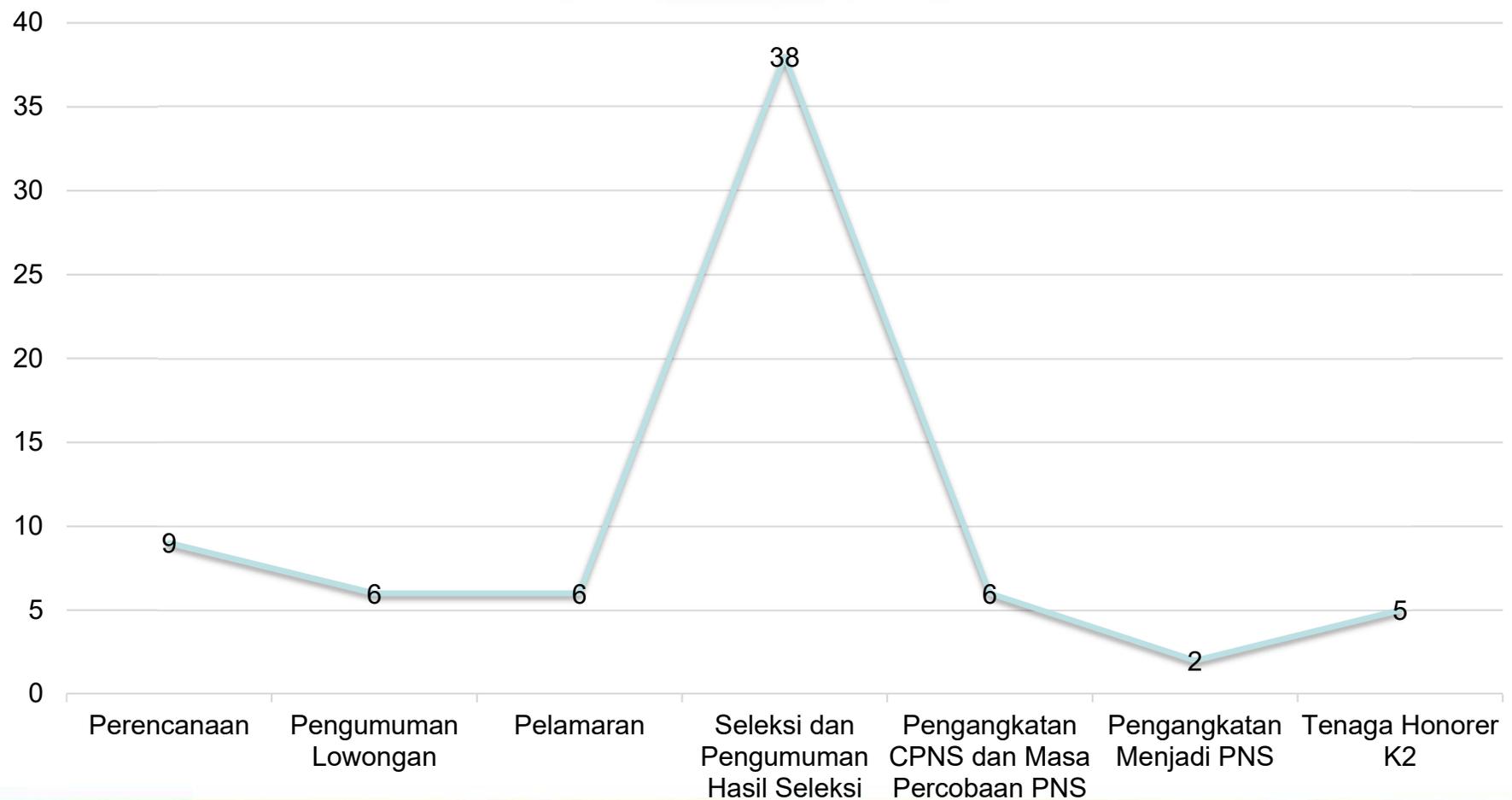
Kepala BPKP,

Ardan Adiperdana

NIP 19590616 197911 1 001

GRAFIK IDENTIFIKASI RISIKO

Identifikasi Risiko Tahapan Pengadaan CPNS



DAFTAR RISIKO

NO	PROSES BISNIS	PERNYATAAN RISIKO	CONTOH MITIGASI RISIKO
1	Perencanaan		
a.	Prasarana dan Sarana IT untuk Pengadaan PNS	Sarana prasarana untuk sistem koneksi IT di lokasi ujian kurang memadai	Implementasi Perban BKN No 8 Tahun 2018 tentang Prosedur Penyelenggaraan Seleksi dengan metode CAT BKN
b.	Prasarana dan Sarana Fisik untuk Pengadaan PNS	Kuantitas sarana dan prasarana untuk pelaksanaan ujian (CAT) kurang memadai Kualitas sarana prasarana untuk pelaksanaan ujian (CAT) tidak memadai (tidak sesuai dengan kriteria standar yang ditetapkan)	Implementasi Perban BKN No 8 Tahun 2018 tentang Prosedur Penyelenggaraan Seleksi dengan metode CAT BKN
c.	Petunjuk Teknis dan Peraturan Pendukung Lainnya	Kebijakan operasional pelaksanaan seleksi tidak didokumentasikan dengan baik	

Sudah 2 Kali Ratusan Komputer Mati saat Tes CAT PNS

Nur Azizah · Rabu, 18 Oct 2017 15:40 WIB

#seleksi CPNS

News > Peristiwa

TWITTER

FACEBOOK

GOOGLE+

NASIONAL

Komputer Tes CPNS Ngadat, Peserta Laporan ORI



By Iman

Posted on 14 Sep 17 15:52



[BACK](#)

DAFTAR RISIKO

NO	PROSES BISNIS	PERNYATAAN RISIKO	CONTOH MITIGASI RISIKO
2	Pengumuman Lowongan	Pengumuman dilakukan dalam rentang waktu yang sempit	
		Kriteria persyaratan yang harus dipenuhi pelamar tidak diumumkan secara utuh kepada masyarakat.	
		Pengumuman lowongan memberikan informasi yang multitafsir/bias kepada masyarakat (misal: pernyataan untuk kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan tidak mencantumkan formasi yang dibutuhkan secara jelas)	
		Urutan tahapan pengadaan PNS tidak sesuai dengan PP No. 11 tahun 2017	

Kamis, 02 Nov 2017 11:00 WIB

Seleksi CPNS Kementerian Keuangan Banjir Protes

- detikFinance



Tes CPNS 2017

Mimpi Bekerja di KKP Ditenggelamkan Syarat "Rekomendasi" Psikolog



[BACK](#)

DAFTAR RISIKO

NO	PROSES BISNIS	PERNYATAAN RISIKO	CONTOH MITIGASI RISIKO
3	Pelamaran	<p>Pelamar sesuai kriteria dalam Pasal 23 ayat (1) PP 11 Tahun 2017 tidak dapat mengikuti seleksi CPNS (NIK calon pelamar tidak terdaftar di sistem Dinas Dukcapil)</p> <p>Periode penyampaian lamaran tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku (dibuat dalam rentang waktu yang sempit)</p> <p>Laman Pendaftaran online sulit diakses (kendala teknis seperti server down)</p> <p>Pertukaran data dari portal nasional pendaftaran online panselnas dengan portal instansi terkendala masalah teknis</p>	<p>Berkoordinasi dengan Disdukcapil setempat untuk membantu peserta yang memiliki E-KTP namun belum terekam dalam system.</p> <p>Pengujian sistem seleksi CPNS</p> <p>Pengujian sistem seleksi CPNS</p>

Ada 5 Ribu Masalah KTP-el Seputar Pendaftaran CPNS

M Sholahadhin Azhar • Rabu, 20 Sep 2017 02:03 WIB

#e-ktp #seleksi cpn

News > Politik

TWITTER

FACEBOOK

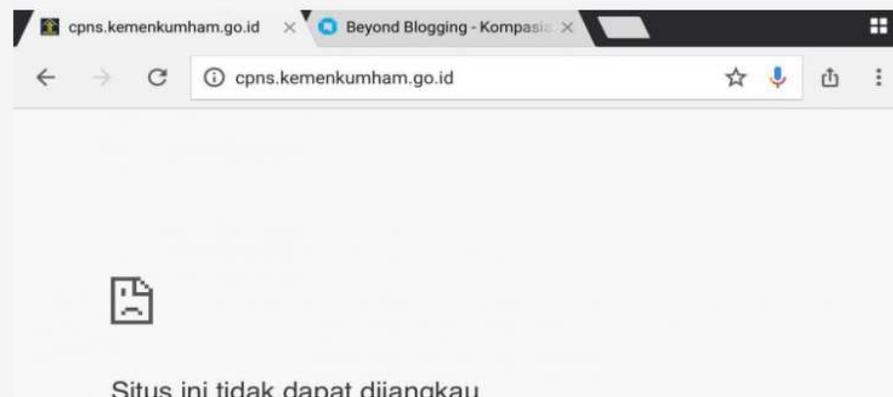
GOOGLE+



8 September 2017 19:07 | Diperbarui: 8 September 2017 19:13 | 1521 | 0 | 0



Web CPNS.Kemencumham.Go.Id Down? Masih Lemahkah Antisipasi Birokrat?



[BACK](#)

DAFTAR RISIKO

NO	PROSES BISNIS	PERNYATAAN RISIKO	CONTOH MITIGASI RISIKO
4	Seleksi dan Pengumuman Hasil Seleksi		
a.	Persiapan Seleksi	Adanya akses ke main server oleh pihak yang tidak berhak Distribusi data dari server ke komputer klien di titik ujian terkendala masalah teknis/jaringan Tidak dilakukan pengujian infrastruktur tes pada lokasi mandiri	SK otorisasi Implementasi Perban BKN No 8 Tahun 2018 Implementasi Perban BKN No 8 Tahun 2018
b.	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) (Computer Assisted Test/CAT)	Panitia/pengawas ujian tidak tercantum dalam SK Jumlah pengawas ujian yang tidak memadai Peserta ujian bukan peserta yang terdaftar/Jockey Peserta ujian tidak jujur dalam pelaksanaan ujian (kerjasama antar peserta, menggunakan alat bantu komunikasi dll)	Membuat SK Panitia Pelaksanaan Seleksi pada KLD SOP Pelaksanaan Seleksi SOP Pelaksanaan Seleksi (barang disita, peserta digugurkan dalam pelaksanaan seleksi sesuai kebijakan panitia).



[BACK](#)

DAFTAR RISIKO

NO	PROSES BISNIS	PERNYATAAN RISIKO	CONTOH MITIGASI RISIKO
c	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) (Computer Assisted Test/CAT)	Kurang siapnya Panselda/instansi dalam menyiapkan sarana dan prasarana pada Tempat Uji Kompetensi (TUK)	Implementasi Perban BKN No 8 Tahun 2018
		Distribusi soal tes dari main server panselnas ke komputer klien (TUK) terkendala masalah teknis/jaringan LAN	Implementasi Perban BKN No 8 Tahun 2018
		Tidak tertatanya infrastruktur di lokasi ujian yang dapat mengganggu pelaksanaan seleksi	
		Kendala aliran listrik (genset tidak berfungsi optimal)	Disiapkan genset cadangan
		Server dan/atau Computer client tidak berfungsi baik atau tiba-tiba macet (hang)	
		Server dan jaringan data di TUK dan Main server mendapat gangguan atau diakses oleh orang yang tidak berhak.	SK otorisasi

Tes CPNS di Bandung Tersendat akibat Komputer Peladen Anjlok



DAFTAR RISIKO

NO	PROSES BISNIS	PERNYATAAN RISIKO	CONTOH MITIGASI RISIKO
c	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) (Computer Assisted Test/CAT)	Lokasi ujian tidak memadai/representatif	Implementasi Perban BKN No 8 Tahun 2018
		Terdapat komputer/laptop yang tidak dapat berfungsi selama pelaksanaan ujian	Implementasi Perban BKN No 8 Tahun 2018
		Tidak ada prosedur pengamanan server (misal: dengan melakukan penyegelan ruangan tempat penyimpanan server dan dijaga oleh pihak keamanan selama 24 (dua puluh empat) jam sehari sampai pelaksanaan seleksi selesai)	Implementasi Perban BKN No 8 Tahun 2018
		Panitia tidak membuat BA sebagaimana tertuang dalam Perban BKN No 8 Tahun 2018	Pengawasan oleh APIP
		Adanya hasil ujian dari beberapa lokasi yang tidak tergabung	Rekonsiliasi data hasil pelaksanaan seleksi oleh BKN dan Panitia KLD
		Tim pengawas kesulitan mendapatkan dokumen pendukung dari panitia BKN dalam menjalankan fungsi pengawasan pada pelaksanaan SKD	Koordinasi APIP, Panitia KLD, dan Panitia BKN

DAFTAR RISIKO

NO	PROSES BISNIS	PERNYATAAN RISIKO	CONTOH MITIGASI RISIKO
d.	Integrasi Nilai SKD dan SKB	Penyampaian hasil test ke Panselnas berbeda dengan hasil test sebenarnya	Rekonsiliasi data hasil pelaksanaan seleksi oleh BKN dan Panitia KLD
		Pansel Instansi K/L/D terlambat menyampaikan hasil SKB	
		Terdapat hasil tes (peserta/regional tertentu) yang belum diintegarsikan dalam olah data hasil pengumuman	Rekonsiliasi data hasil pelaksanaan seleksi oleh BKN dan Panitia KLD
		Terdapat peserta yang memiliki nilai yang sama dalam peringkat akhir kelulusan	
e.	Pengumuman Penetapan Hasil Kelulusan	Pengumuman kelulusan CPNS berbeda dengan hasil test (SKD dan SKB)	Rekonsiliasi data hasil pelaksanaan seleksi oleh BKN dan Panitia KLD
		Tingginya pengajuan keberatan oleh peserta misal: hasil SKD tinggi namun dinyatakan tidak lulus karena nilai SKB yang tidak transparan	
		Terdapat peserta yang mengundurkan diri	



DAFTAR RISIKO

NO	PROSES BISNIS	PERNYATAAN RISIKO	CONTOH MITIGASI RISIKO
5	Pengangkatan CPNS dan Masa Percobaan PNS		
a	Pemberkasan	Data Salah/ Tidak Benar Palsu/ Tidak Lengkap Penyampaian Data/Berkas Kepegawaian oleh K/L dan Pemda berlarut-larut Penyalahgunaan oleh oknum tertentu (Pemerasan/Pungli) dengan mempersulit kelengkapan berkas	Digugurkan, pengenaan sanksi pada peserta Pakta integritas, pengenaan sanksi
b	Pelaksanaan Diklat	Tidak tersedia cukup anggaran untuk pelaksanaan diklat bagi CPNS yang diterima dalam rentang periode yang ditentukan. Jadwal pelaksanaan diklat tidak dapat dilaksanakan dalam rentang periode yang ditentukan.	Perencanaan anggaran

Home / News / Nasional

Menkumham Sebut Oknumnya yang Pungli CPNS di Papua Sedang Ditangani

ROBERTUS BELARMINUS

Kompas.com - 09/11/2017, 16:55 WIB



Petugas selidiki pungli senilai Rp 450 juta atas rekrutmen CPNS di Kemenag Solo

Rabu, 30 Mei 2018 12:59

Reporter : Arie Sunaryo



BUKA DEPOS
DAPAT BONUS



2 Pegawai BKD Garut Jadi Tersangka Kasus Pungli CPNS

Dony Indra Ramadhan - detikNews



[BACK](#)

DAFTAR RISIKO

NO	PROSES BISNIS	PERNYATAAN RISIKO	CONTOH MITIGASI RISIKO
6	Pengangkatan Menjadi PNS	Kelulusan CPNS dalam mengikuti pendidikan dan pelatihan tidak sesuai prosedur/kriteria kelulusan	
7	Pengadaan CPNS Formasi Tenaga Honorer Kategori 2	<p>Demo dari tenaga honorer kategori 2 yang tidak memenuhi syarat</p> <p>Peserta tenaga honorer kategori 2 yang tidak berhak tapi lolos (pemalsuan berkas)</p> <p>Penyalahgunaan oleh Oknum tertentu (Pemerasan/Pungli) dengan mempersulit kelengkapan berkas</p>	<p>Digugurkan, pengenaan sanksi pada peserta</p> <p>Pakta integritas, pengenaan sanksi</p>



Pejabat Pembina Kepegawaian Pemda
agar mengelola risiko dengan efektif serta
memberdayakan peran **APIP** **untuk**
memberikan peringatan dini dan
meningkatkan efektivitas penegelolaan risiko.



BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

TERIMA KASIH

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
Jalan Pramuka No 33 Jakarta 13120
Telepon (021) 85910031 (*hunting*)
Web: <http://www.bpkp.go.id>